

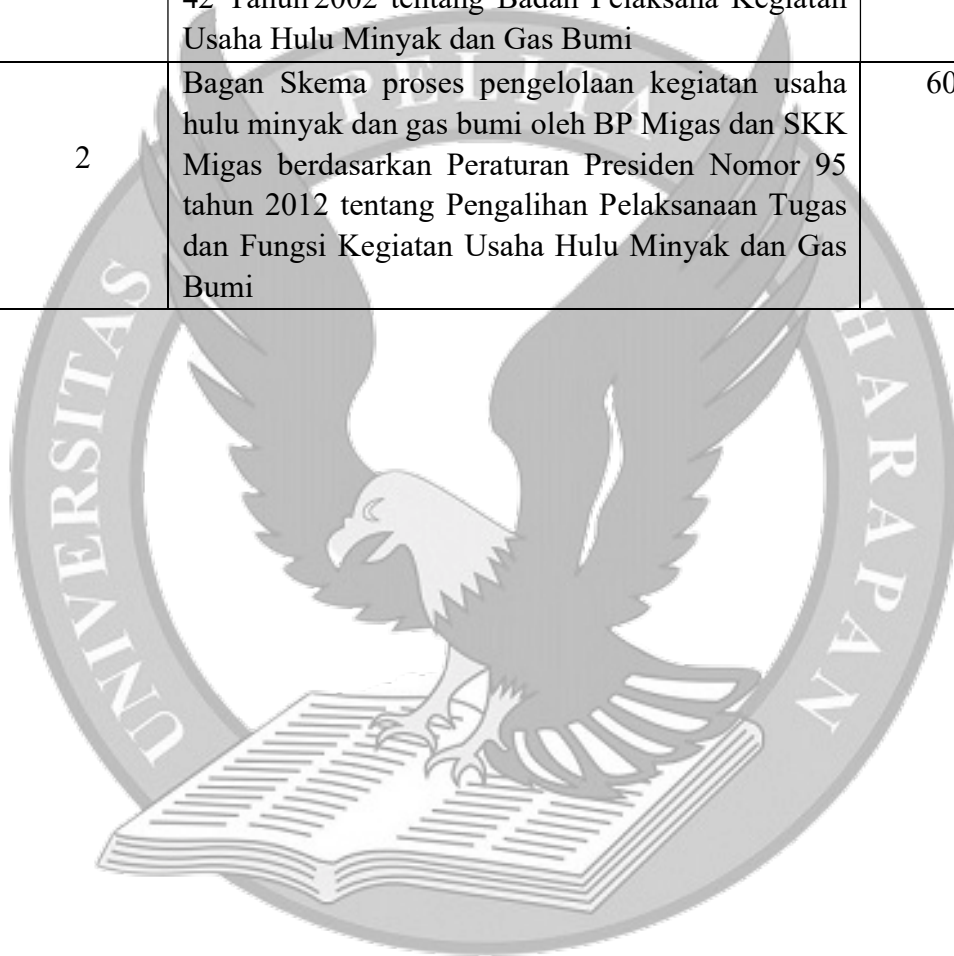
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	28
1.3 Tujuan Penelitian.....	29
1.4 Manfaat Penelitian.....	30
1.5 Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
2.1 Tinjauan Teoritis.....	32
2.1.1 Teori Production Sharing Contract (PSC).....	33
2.1.1.1 Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.....	33
2.1.1.2 Badan Pelaksana Hulu Migas.....	39
2.1.1.3 Production Sharing Contract.....	43
2.1.2 Teori Pemerintah.....	53
2.1.2.1 Pengertian Pemerintah.....	53
2.1.2.2 Standar Pelayanan Pemerintah.....	54
2.1.2.3 Pemerintah dalam UU Migas.....	57
2.1.3 Teori Perizinan.....	64

2.1.3.1	Pengertian dan Sifat.....	64
2.1.3.2	Unsur dan Fungsi Perizinan.....	67
2.1.3.3	Proses dan Prosedur Perizinan.....	68
2.1.3.4	Sistem Perizinan Terintegrasi Elektronik.....	71
2.1.4	Teori Sikap dengan Pendekatan Behaviour.....	72
2.1.4.1	Pengertian dan Komponen Sikap	72
2.1.4.2	Pendekatan Behaviour	75
2.2	Tinjauan Konseptual.....	77
BAB III METODE PENELITIAN		95
3.1	Jenis Penelitian	95
3.2	Jenis Data.....	96
3.3	Metode Pengumpulan Data	97
3.4.	Jenis Pendekatan.....	98
3.5.	Analisa Data	98
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....		100
4.1	Hasil Penelitian.....	100
4.2	Analisis terhadap Pemerintah yang Mewajibkan Pelaku Usaha Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk Mendaftarkan Izin ke Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	105
4.3	Analisis terhadap Tindakan Pelaku Usaha Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam Melakukan Pendaftaran Izin di Sistem Online Single Submission (OSS)	124
BAB V PENUTUP		141
5.1	Kesimpulan.....	141
5.2	Saran	142
DAFTAR PUSTAKA		144

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
1	Bagan Skema proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh BP Migas dan SKK Migas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	60
2	Bagan Skema proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh BP Migas dan SKK Migas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	60



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1	Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	61

